

2024 LAPORAN KEUANGAN AUDITED



SKIPM JAMBI

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun KIPM Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Audited Kantor Stasiun KIPM Jambi Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun KIPM Jambi. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jambi 06 Mei 2025

Kepala Stasiun KIPM Jambi,



Piyan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, MH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Ringkasan Laporan Keuangan	1
1. Laporan Realisasi Anggaran	1
2. Neraca	1
3. Laporan Operasional	1
4. Laporan Perubahan Ekuitas	2
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	2
1.1 Rincian Laporan Realisasi Anggaran	3
1.2 Rincian Neraca	4
1.3 Rincian Laporan Operasional	5
1.4 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas	6
A. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A.1 Profil Dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun KIPM Jambi	7
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	7
A.3 Basis Akuntansi	8
A.4 Dasar Pengukuran	9
A.5 Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1 Pendapatan	19
B.2 Belanja	20
B.3 Belanja Pegawai	20
B.4 Belanja Barang	21
B.5 Belanja Modal	21
B.5.1 Belanja Modal Tanah	22
B.5.2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	22
B.5.3 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	23
B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	23
B.5.5 Belanja Modal Lainnya	23

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	23
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	24
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	24
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	24
C.4 Piutang PNB	25
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	25
C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	25
C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar	26
C.8 Belanja Dibayar di Muka	26
C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	27
C.10 Persediaan	27
C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	27
C.12 Tagihan Penjualan Angsuran	28
C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	28
C.14 Tanah	29
C.15 Peralatan dan Mesin	30
C.16 Gedung dan Bangunan	31
C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31
C.18 Aset Tetap Lainnya	32
C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	33
C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	33
C.21 Aset Tak Berwujud	33
C.22 Aset Lain-Lain	34
C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	35
C.24 Uang Muka dari KPPN	35
C.25 Utang kepada Pihak Ketiga	35
C.26 Utang Yang Belum ditagihkan	36
C.27 Pendapatan Diterima di Muka	36
C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar	36
C.29 Ekuitas	36

D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 37

D.1	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	37
D.2	Beban Pegawai	37
D.3	Beban Persediaan	38
D.4	Beban Barang Dan Jasa	39
D.5	Beban Pemeliharaan	39
D.6	Beban Perjalanan Dinas	40
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	40
D.8	Beban Bantuan Sosial	40
D.9	Beban Penyusutan Dan Amortisasi	41
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	41
D.12	Kegiatan Non Operasional	42
D.13	Pos Luar Biasa	42

E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 43

E.1	Ekuitas Awal	43
E.2	Surplus (Defisit) LO	43
E.3.2	Penyesuaian Nilai Aset	43
E.3.3	Koreksi Nilai Persediaan	43
E.3.4	Selisih Revaluasi Aset Tetap	44
E.3.5	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	44
E.3.6	Koreksi Lain-Lain	44
E.4	Transaksi Antar Entitas	45
E.4.1	Diterima Dari Entitas Lain (Ddel)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (Dkel) ...	45
E.4.2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	45
E.4.3	Pengesahan Hibah Langsung Dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	46
E.5	Ekuitas Akhir	47

F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya 48

F.1	Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	48
F.2	Pengungkapan Lain-Lain	48



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Stasiun KIPM Jambi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Audited 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jambi, 06 Mei 2025

Kepala Stasiun KIPM Jambi,



Priyan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, MH

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Jambi Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode Per 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara pada periode Per 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp11.318.253. atau mencapai 21% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp54.455.000.

Realisasi Belanja Negara pada periode Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.849.161.236 atau mencapai 99% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.919.413.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Per 31 Desember 2024. Nilai Aset Per 31 Desember 2024 dicatat sebesar Rp3.322.845.226 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp30.613.661; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.292.231.565 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp30.408.172 dan Rp3.292.437.054

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.525.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5.082.944.100 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp5.078.419.100. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp6.793.253 dan Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp5.071.625.847.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp8.441.756.318 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp5.071.625.847 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp77.693.417 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal Per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 3.292.437.054

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR STASIUN KIPM JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Per 31 Desember 2024		% thd Angg	Per 31 Desember 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	54,455,000	11,318,253	20.78	35,940,066
JUMLAH PENDAPATAN		54,455,000	11,318,253	20.78	35,940,066
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2,583,106,000	2,579,751,300	99.87	3,865,044,748
Belanja Barang	B.4	2,336,307,000	2,269,409,936	97.14	2,965,077,293
Belanja Modal	B.5	-	-	0.00	147,884,000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		
JUMLAH BELANJA		4,919,413,000	4,849,161,236	98.57	6,978,006,041

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR STASIUN KIPM JAMBI
NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan G	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	30,613,661	15,259,421
Jumlah Aset Lancar		30,613,661	15,259,421
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	18,000,000	2,619,362,100
Peralatan dan Mesin	C.15	6,182,780,538	7,240,225,432
Gedung dan Bangunan	C.16	3,137,524,432	5,769,905,432
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	387,293,000	430,201,000
Aset Tetap Lainnya	C.18	19,850,000	19,850,000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(6,453,216,405)	(7,640,014,264)
Jumlah Aset Tetap		3,292,231,565	8,439,529,700
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		3,322,845,226	8,454,789,121
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	30,408,172	13,032,803
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Utang yang belum ditagihkan	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		30,408,172	13,032,803
JUMLAH KEWAJIBAN		30,408,172	13,032,803
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	3,292,437,054	8,441,756,318
JUMLAH EKUITAS		3,292,437,054	8,441,756,318
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3,322,845,226	8,454,789,121

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR STASIUN KIPM JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4,525,000	29,590,000
JUMLAH PENDAPATAN		4,525,000	29,590,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2,598,431,200	3,865,044,748
Beban Persediaan	D.3	96,857,510	322,460,374
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,182,887,075	1,515,836,668
Beban Pemeliharaan	D.5	561,565,406	537,125,132
Beban Perjalanan Dinas	D.6	411,441,174	620,464,850
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	231,761,735	485,513,406
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		5,082,944,100	7,346,445,178
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5,078,419,100)	(7,316,855,178)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		-
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	6,350,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	19,100,021
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Pelepasan Aset Non Lancar Lainnya		-	(12,750,021)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6,793,253	66
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6,793,253	66
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		6,793,253	(12,749,955)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(5,071,625,847)	(7,329,605,133)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR STASIUN KIPM JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1	8,441,756,318	8,829,295,476
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3,644,696,116)	(5,315,233,063)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3,266,112,741	4,928,074,440
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(378,583,375)	(387,158,623)
EKUITAS AKHIR	E.5	8,063,172,943	8,442,136,853

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun KIPM Jambi

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Stasiun KIPM Jambi didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan .

PERMEN KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Entitas berkedudukan di Jalan Sersan UD Syawal-Paalmerah Jambi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Stasiun KIPM Jambi. Laporan

Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun KIPM Jambi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian LRA. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan PMK Nomor 22/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat.

A.4. Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun KIPM Jambi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Stasiun KIPM Jambi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan sesuai dengan KEP-291/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar (BAS). Kebijakan-kebijakan akuntansi penting

yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Jambi, yaitu:

*Pendapatan
-LRA*

(1)Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2)Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ❖ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ❖ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - ❖ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b.Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga

perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

Aset Tetap

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman KEPMEN Keuangan Nomor: 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 Tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud. Secara umum tabel masa manfaat sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- (1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- (2) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus

Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp11.318.253*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada periode Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.318.253 atau mencapai 21 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp54.455.000. Pendapatan Kantor Stasiun KIPM Jambi terdiri dari Pendapatan Jasa, pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2024

Uraian	Per 31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin			
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya	54,455,000	4,525,000	
Pendapatan Lain-lain	-	6,793,253	
Jumlah	54,455,000	11,318,253	20.78

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2024 baru mencapai 21% di sebabkan menurunnya permintaan untuk pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya di Laboratorium SKIPM Jambi dan adanya perubahan Organisasi.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2024	Realisasi Per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan	4,525,000	35,940,000	-87.41
Pendapatan Lain-lain	6,793,253	66	0.00
Jumlah	11,318,253	35,940,066	-68.51

Realisasi Belanja B.2 Belanja

Negara

Rp4.849.161.236

Realisasi Belanja instansi Per 31 Desember 2024 Rp4.849.161.236 atau mencapai 99% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.919.413.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2024*

Uraian	per 31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2,583,106,000	2,579,751,300	99.87
Belanja Barang	2,336,307,000	2,269,409,936	97.14
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	4,919,413,000	4,849,161,236	98.57

Realisasi belanja Semester II Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023 sebanyak 33,9 % disebabkan di Tahun 2024 terjadi pengurangan pegawai karena adanya perubahan organisasi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024
dan 2023*

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2024	Realisasi per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2,579,751,300	3,865,044,748	(33.25)
Belanja Barang	2,269,409,936	2,965,077,293	(23.46)
Belanja Modal	-	147,884,000	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	4,849,161,236	6,978,006,041	(30.51)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai

Rp2.579.751.300

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.579.751.300 dan Rp3.865.044.748. Realisasi belanja pegawai Per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 33,25 persen dari tahun lalu. Hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan jumlah pegawai yang disebabkan adanya perubahan organisasi di Tahun 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2024	Realisasi Per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,204,774,759	1,864,175,498	(35.37)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1,145,862,541	1,686,624,250	(32.06)
Belanja Lembur	229,114,000	314,245,000	(27.09)
Jumlah Belanja Kotor	2,579,751,300	3,865,044,748	(33.25)
Pengembalian Belanja Pegawai			-
Jumlah Belanja	2,579,751,300	3,865,044,748	(33.25)

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp2.269.409.936

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.269.409.936 dan Rp2.965.077.293. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 23,46 persen dari tahun lalu Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya anggaran belanja barang untuk Tahun Anggaran 2024.

*Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2024	Realisasi Per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja barang operasional	664,305,981	899,442,535	(26.14)
Belanja barang non operasional	60,659,700	225,948,847	(73.15)
Belanja jasa	459,225,925	390,908,533	17.48
Belanja pemeliharaan	561,470,406	536,899,532	4.58
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	411,441,174	620,464,850	(33.69)
Belanja Barang Persediaan	112,306,750	291,412,996	(61.46)
Jumlah Belanja Kotor	2,269,409,936	2,965,077,293	(23.46)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	2,269,409,936	2,965,077,293	(23.46)

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp0

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp147.884.000. Tahun 2024 SKIPM Jambi tidak memiliki anggaran untuk belanja modal.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2024	Realisasi Per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	147,884,000	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	147,884,000	(100.00)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	147,884,000	(100.00)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tahun Anggaran 2024 SKIPM Jambi tidak memiliki alokasi anggaran untuk belanja modal tanah.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi Per 31 Desember 2024	Realisasi Per 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun Anggaran 2024 SKIPM Jambi tidak memiliki alokasi anggaran untuk belanja modal peralatan dan Mesin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan
Mesin Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2024	Realisasi Per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun Anggaran 2024 SKIPM Jambi tidak memiliki alokasi anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi Per 31 Desember 2024	Realisasi Per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Perencanaan dan Pengawasan Gedung	0	0	0.00
perizinan Pembangunan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	0	0	0.00
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tahun Anggaran 2024 SKIPM Jambi tidak memiliki alokasi anggaran untuk belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi Per 31 Desember 2024	Realisasi Per 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Air Baku	0	0	0.00
Jaringan Listrik	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tahun Anggaran 2024 SKIPM Jambi tidak memiliki alokasi anggaran untuk belanja modal lainnya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

Keterangan	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Uang Tunai	0	0
Kuitansi	0	0
Jumlah	-	0

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Daftar PNPB disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

Keterangan	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Uang Tunai		
Bank -		
Jumlah	-	0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

Keterangan	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		
Jumlah		

C.4 Piutang PNB

Piutang PNB
Rp0

Saldo Piutang PNB Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNB Per 31 Desember
2024 dan 2023*

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Piutang PNB		
Piutang Lainnya		
Jumlah		

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

No	Nama	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1			
2			
3			
Jumlah			

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar
TPA
Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

No	Nama	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1			
2			
3			
Jumlah			

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
di Muka Rp0*

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Rincian Belanja Dibayar di Muka
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

Jenis	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung Kantor		
Jumlah	NIHIL	

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidik	NIHIL	
Jumlah		

C.10 Persediaan

Persediaan
Rp30.613.661

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp30.613.661 dan Rp15.259.421. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Barang Konsumsi	30,569,661	13,593,621
Bahan untuk Pemeliharaan	0	95,000
Bahan Baku	44,000	1,570,800
Jumlah	30,613,661	15,259,421

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-

masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian TP/TGR per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

No	Debitur	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1			
2			
3			
Jumlah			

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Debitur	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.14 Tanah

Tanah

Rp18.000.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Stasiun KIPM Jambi Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp18.000.000 dan Rp2.619.362.100. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Desember 2023	2,619,362,100
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	0
Revaluasi aset	0
Penghapusan aset aktif	2,601,362,100
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2024	18,000,000

Rincian saldo Tanah Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Tidak ada mutasi tambah pembelian dan Transfer Masuk

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan aset aktif sebesar Rp2.601.362.100 karena adanya Alih Status Penggunaan BMN Stasiun KIPM Jambi Kepada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jambi

Rincian Tanah Per 31 Desember 2024

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	900 m2	Jambi	18,000,000
Jumlah			18,000,000

C.15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp6.182.780.538*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp6.182.780.538 dan Rp7.240.225.432 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	7,240,225,432
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	50,320,000
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Reklasifikasi Masuk	0
Penghapusan aset aktif	-1,107,764,894
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2024	6,182,780,538
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(5,700,119,986)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	482,660,552

Mutasi transaksi penambahan Peralatan dan Mesin berupa:

Mutasi Tambah:

1. Transfer masuk laptop Asus 2 unit sebesar Rp37.080.000
2. Transfer masuk Scanner (Peralatan Personal Komputer) Epson Workforce DS-410 1 unit sebesar Rp.7.460.000
3. Transfer masuk Tablet PC SAMSUNG Galaxy Tab A9 Plus 1 unit sebesar Rp. 5.780.000

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan aset aktif sebesar Rp1.109.760.734 karena adanya Alih Status Penggunaan BMN Stasiun KIPM Jambi Kepada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jambi

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp3.137.524.432*

Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp3.137.524.432 dan Rp5.769.905.432. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	5,769,905,432
Mutasi tambah:	-
Pembangunan Gedung dan Bangunan	-
Mutasi kurang:	-
Penghapusan aset aktif	2,632,381,000
Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2024	3,137,524,432
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2024	(430,507,172)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2,707,017,260

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

Mutasi Tambah:

Tidak ada mutasi tambah pembelian dan Transfer Masuk

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan aset aktif sebesar Rp2.632.381.000 karena adanya Alih Status Penggunaan BMN Stasiun KIPM Jambi Kepada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jambi

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp 387.293.000*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp387.293.000 dan Rp430.201.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah

sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	430,201,000
Mutasi tambah:	
Penambahan	-
Mutasi kurang:	-
Penghapusan aset aktif	42,908,000
Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2024	387,293,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(322,589,247)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	64,703,753

Mutasi Tambah:

Tidak ada mutasi tambah pembelian dan Transfer Masuk

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan aset aktif sebesar Rp42.908.000 karena adanya Alih Status Penggunaan BMN Stasiun KIPM Jambi Kepada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jambi

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.18 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp19.850.000*

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp19.850.000 dan Rp19.850.000. Aset tetap tersebut berupa buku perpustakaan. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Per 31 Desember 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	19,850,000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2024	19,850,000

Mutasi Tambah:

Tidak ada mutasi tambah pembelian dan Transfer Masuk

Mutasi Kurang:

Tidak ada mutasi Kurang pada periode 31 Desember 2024

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Sampai dengan tanggal neraca Per 31 Desember 2024 tidak ada konstruksi dalam pengerjaan. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1				-	
2				-	
	Jumlah	-		-	

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp6.453.216.405*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp6.453.216.405 dan Rp7.640.014.264. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	6,182,780,538	5,700,119,986	482,660,552
2	Gedung dan Bangunan	3,137,524,432	430,507,172	2,707,017,260
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	387,293,000	322,589,247	64,703,753
4	Aset Tetap Lainnya	19,850,000	0	19,850,000
	Akumulasi Penyusutan	9,727,447,970	6,453,216,405	3,274,231,565

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.21 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Per 31 Desember 2024 SKIPM Jambi tidak memiliki Aset Tak berwujud. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak

Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Mutasi Tambah:

Tidak ada mutasi tambah pembelian dan Transfer Masuk

Mutasi Kurang:

Tidak ada mutasi Kurang pada periode 31 Desember 2024

Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud
Per 31 Desember 2024*

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
		0		
		NIHIL		
	Jumlah	0		

C.22 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp0*

Saldo Aset Lain-lain Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Per 31 Desember 2024 SKIPM Jambi Tidak Memiliki Aset lain – lain. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- reklasifikasi ke Aset Tetap	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0 Saldo Uang Muka dari KPPN per Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp30.408.172 Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp30.408.172 dan Rp 13.032.803. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Stasiun KIPM Jambi Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Beban pegawai yang masih harus dibayar	18,679,900
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	11,728,272
Total	-	30,408,172

Utang kepada pihak ketiga yaitu Belanja pegawai yang harus dibayar yaitu kekurangan Tunjangan Kinerja bulan Desember Tahun 2024 untuk 4 orang pegawai sebesar Rp18.679.900 dan Belanja barang yang masih harus

dibayar yaitu Beban listrik dan internet bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp11.728.272.

C.26 Utang Yang Belum ditagihkan

*Utang yang
Belum
ditagihkan
Rp0*

Nilai Utang yang Belum ditagihkan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Per 31 Desember 2024 tidak ada utang yang belum ditagihkan.

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Per 31 Desember 2024 SKIPM Jambi tidak memiliki Pendapatan Diterima di Muka.

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp30.408.172*

Beban yang Masih Harus Dibayar Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp30.408.172 dan Rp13.032.803. Beban yang masih harus dibayar bulan Desember Tahun 2024 berupa beban keperluan perkantoran sebesar Rp2.955.495, beban langganan listrik sebesar Rp8.772.777 dan beban pegawai (Tunjangan khusus/kegiatan) kepada 4 pegawai sebesar Rp18.679.900, dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Beban Keperluan perkantoran	2,955,495	2,989,900
Beban Langganan listrik	8,772,777	10,042,903
Beban Pegawai(Tunjangan Khusus/Kegiatan)	18,679,900	-
Jumlah	30,408,172	13,032,803

C.29 Ekuitas

*Ekuitas
Rp
3.292.437.054*

Ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3.292.437.054 dan Rp8.441.756.318. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp4.525.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp4.525.000 dan Rp29.590.000. Penurunan pendapatan PNB Per 31 Desember 2024 disebabkan di sebabkan menurunnya permintaan untuk pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya di Laboratorium SKIPM Jambi. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	4,525,000	29,590,000	(85)
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	0	0
Jumlah	4,525,000	29,590,000	(85)

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp2.598.431.200

Jumlah Beban Pegawai pada Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.598.431.200 dan Rp3.865.044.748. Perbedaan Beban Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp18.679.900 disebabkan adanya Belanja pegawai yang harus dibayar berupa Kekurangan Tunjangan Kinerja Bulan Desember Tahun 2024 kepada 4 pegawai.

*Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	846,200,600	1,318,647,600	(36)
Beban Pembulatan Gaji PNS	12,950	-53	(24,534)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(86)	94,970,280	
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	56,047,330	31,216,040	80
Beban Tunj. Anak PNS	20,169,798	17,640,000	14
Beban Tunj. Struktural PNS	14,400,000	95,270,000	(85)
Beban Tunj. Fungsional PNS	25,585,000	1,970,479	1,198
Beban Tunj. PPh PNS	4,601,965	80,024,100	(94)
Beban Tunj. Beras PNS	46,059,120	210,982,000	(78)
Beban Uang Makan PNS	113,277,000	13,805,000	721
Beban Tunjangan Umum PNS	23,655,000	-370,000	(6,493)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(185,328)	20,052	
Beban Gaji Pokok PPPK	38,443,200		
Beban Pembulatan Gaji PPPK	906		
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,844,320		
Beban Tunjangan Anak PPPK	768,864		
Beban Tunjangan Beras PPPK	2,607,120		
Beban Uang Makan PPPK	7,067,000		
Beban Tunjangan Umum PPPK	2,220,000		
Beban Lembur	229,114,000	314,245,000	(27)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1,164,542,441	1,686,624,250	(31)
Jumlah	2,598,431,200	3,865,044,748	(33)

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp96.857.510*

Jumlah Beban Persediaan pada Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp96.857.510 dan Rp322.460.374. Rincian Beban Persediaan untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	82,927,710	168,930,594	(51)
Beban Persediaan Bahan Baku	13,929,800	153,529,780	(91)
Beban persediaan lainnya			
Jumlah	96,857,510	322,460,374	(70)

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa Rp
1.182.887.075*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.182.887.075 dan Rp1.515.836.668. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	474,433,494	622,179,688	(23.75)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	37,088,282	86,394,497	(57.07)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	410,000	2,046,000	(79.96)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	60,488,000	115,200,000	(47.49)
Beban Barang Operasional Lainnya	91,851,800	73,758,950	24.53
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19			
Beban Bahan	47,143,150	195,153,532	(75.84)
Beban Honor Output Kegiatan	4,896,000	8,160,000	(40.00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	8,620,550	22,635,315	
Beban Langganan Listrik	137,122,799	165,056,528	(16.92)
Beban Langganan Telepon		616,358	
Beban Langganan Daya dan Jasa			
Beban Sewa	29,100,000	57,490,000	(49.38)
Beban Jasa Profesi	3,600,000	6,300,000	(42.86)
Beban Jasa Lainnya	288,133,000	160,845,800	79.14
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid - 19			
Beban Aset Estrakomtabel Peralatan dan Mesin			
Jumlah	1,182,887,075	1,515,836,668	(21.96)

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp561.565.406*

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp561.565.406 dan Rp537.125.132. Rincian beban pemeliharaan untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	295,803,450	216,170,500	36.84
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	265,666,956	320,729,032	(17.17)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP)	-	-	
Beban Persediaan Suku Cadang			
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	95,000	225,600	
Jumlah	561,565,406	537,125,132	4.55

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp411.441.174*

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp411.441.174 dan Rp620.464.850. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Beban Perjalanan Biasa	382,126,174	315,706,450	21.04
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,315,000	65,590,000	(59.88)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,000,000	12,600,000	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		226,568,400	(100.00)
Jumlah	411,441,174	620,464,850	(33.69)

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada
Masyarakat Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
Jumlah			

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Per 31 Desember 2024 dan

2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial			
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial			
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial			
Belanja Modal BLU	0	0	0.00
Jumlah			

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp
231.761.735*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp231.761.735 dan Rp485.513.406. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	166,563,177	356,116,290
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	62,934,601	124,869,204
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	2,263,957	4,527,912
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Penyusutan	231,761,735	485,513,406
Beban Amortisasi Software	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	231,761,735	485,513,406

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar			
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar			
Jumlah			

NIHIL

D.12 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp6.793.253

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan	0	0	0.00
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin		6,350,000	0.00
Beban kerugian pelepasan aset		(19,100,021)	0.00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(12,750,021)	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6,793,253	66	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0.00
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	6,793,253	66	0.00
Defisit Selisih Kurs			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	6,793,253	(12,749,955)	0.00

*) Pendapatan/ Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal Rp
8.441.756.318*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.441.756.318 dan Rp8.829.295.476.

E.2 Surplus (Defisit) LO

*Defisit LO
Rp 5.071.625.847*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp5.071.625.847 dan Rp7.329.605.133. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan
Per 31 Desember 2024*

Jenis Persediaan	Koreksi
Pita Cukai, Materai dan Leges	-
Bahan Baku	-
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	NIHIL

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Per 31 Desember 2024*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	NIHIL

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain
Per 31 Desember 2024*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Kewajiban	-
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas Rp
(77.693.417)*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(77.693.417) dan Rp6.942.065.975. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
Per 31 Desember 2024*

Transaksi Antar Entitas	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Diterima dari Entitas Lain	-11,318,253	-35,940,066
Ditagihkan ke Entitas Lain	4,849,161,236	6,978,006,041
Transfer Masuk	Rp 50,320,000	-
Transfer Keluar	Rp (4,965,856,400)	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah	Rp (77,693,417)	6,942,065,975

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga Per 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp(11.318.253) sedangkan DKEL sebesar Rp4.849.161.236.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas

lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2024 sebesar Rp50.320.000 terdiri dari:

No	TGLBUKU	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	31 Desember 2024	Lap Top	BKIPM Denpasar	18540000
2	31 Desember 2024	Lap Top	BKIPM Denpasar	18540000
3	31 Desember 2024	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	BKIPM Denpasar	7460000
4	31 Desember 2024	Tablet PC	BKIPM Denpasar	5780000
				50,320,000

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.965.856.400.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	BKI Jambi	Rp 1,107,764,894
2	Tanah	BKI Jambi	Rp 2,601,362,100
3	Gedung dan Bangunan	BKI Jambi	2,632,381,000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	BKI Jambi	42,908,000
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BKI Jambi	(1,008,691,041)
6	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	BKI Jambi	(398,205,088)
7	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	BKI Jambi	(11,663,465)
	Jumlah		4,965,856,400

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2023. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan Per 31 Desember 2024 adalah Rp0.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp3.292.437.054

Nilai Ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.292.437.054 dan Rp8.441.756.318.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal Neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Penjelasan Anggaran Prioritas Nasional (PN) TA 2024

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan Kode 01 dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP, dengan Rincian Pagu Rp90.000.000 dan realisasi Rp85.238.723 atau 94,71 %, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA SATKER	PROGRAM PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SATUAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	CAPAIAN RINCIAN OUTPUT	%
Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	10.000.000	9.812.030	98,12%	Produk	2	2	100
Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Hasil perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	50.000.000	47.150.995	94,30%	Produk	2	2	100
Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	UPI yang konsisten menerapkan sitem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	30.000.000	28.275.698	94,25%	Lembaga	2	2	100

F.2.2 Capaian Output Strategis TA 2024

Capaian Output merupakan satu satu indikator di dalam aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran pada IKPA. Indikator Capaian Output mengukur sejauh apa progress dan realisasi dari kinerja yang sudah dilaksanakan. Selama periode Tahun Anggaran 2024, output strategis yang telah dicapai oleh SKIPM Jambi terdiri dari 16 kegiatan yaitu 3 RO untuk kegiatan Prioritas Nasional dan 13 RO kegiatan Non Prioritas Nasional. Capaian Output SKIPM Jambi dapat kami sampaikan dalam tabel di bawah ini:

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	URAIAN RINCIAN OUTPUT	PN / TEMATIK	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI BELANJA (RP)	PERSENTASE PENYERAPAN	TARGET KELUARAN	REALISASI VOLUME KELUARAN	PROGRES CAPAIAN OUPUT
1	ADF001	Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	NON PN	20.000.000	19.663.100	98,32%	5	5	100
2	PDC001	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	PN	10.000.000	9.812.030	98,12%	2	2	100
3	PDD002	Produk kelautan dan perikanan sector produksi pasca panen yang divalidasi	NON PN	10.000.000	9.430.000	94,30%	1	1	100
4	PDF002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	NON PN	108.000.000	92.874.300	85,99%	20	20	100
5	QIA001	Hasil perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	PN	50.000.000	47.150.995	94,30%	2	2	100
6	QIC002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	PN	30.000.000	28.275.698	94,25%	2	2	100
7	DCC001	Bimbingan Teknis Peningkatan Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	NON PN	8.000.000	5.874.200	73,43%	1	1	100
8	PBR001	Rekomendasi kebijakan Parameter Uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan dan perikanan	NON PN	60.000.000	58.956.351	98,26%	1	1	100

9	PDD001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	NON PN	8.500.000	8.474.600	99,70%	1	1	100
10	PDD002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	NON PN	18.000.000	15.986.500	88,81%	1	1	100
11	QIA001	Unit/usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar sistem dan regulasi	NON PN	8.500.000	8.076.500	95,02%	1	1	100
12	EBA962	Layanan Umum	NON PN	138.940.000	136.317.003	98,11%	1	1	100
13	EBA994	Layanan Perkantoran	NON PN	4.345.347.000	4.307.862.326	99,14%	1	1	100
14	EBC954	Layanan Manajemen SDM	NON PN	39.965.000	36.651.314	91,71%	27	27	100
15	EBD952	Layanan Perencanaan dan penganggaran	NON PN	52.140.000	51.955.833	99,65%	1	1	100
16	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	NON PN	12.021.000	11.985.900	99,71%	1	1	100

F.2.3 Utang pada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.408.172 berupa Belanja pegawai yang harus dibayar yaitu kekurangan Tunjangan Kinerja untuk 4 pegawai sebesar Rp18,679,900 dan Belanja barang yang masih harus dibayar yaitu pembayaran listrik dan internet bulan Desember sebesar Rp11,728,272.

F.2.4 Transfer Masuk

Per 31 Desember 2024 terdapat Transfer Masuk sebesar Rp50.320.000 dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar yaitu berupa :

1. laptop Asus 2 unit sebesar Rp37.080.000,
2. Scanner (Peralatan Personal Komputer) Epson Workforce DS-410 1 unit sebesar Rp7.460.000 dan
3. Tablet PC SAMSUNG Galaxy Tab A9 Plus 1 unit sebesar Rp5.780.000

F.2.5 Transfer Keluar

Per 31 Desember 2024 terdapat Transfer Keluar berupa aset tetap sebesar Rp4.965.856.400 ke Balai Karantina Indonesia Jambi yaitu berupa:

1. Tanah sebesar Rp2.601.362.100,
2. Gedung dan bangunan sebesar Rp2.234.175.912,
3. Peralatan dan mesin sebesar Rp99.073.853, dan
4. Jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp31.244.535

F.2.6 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

Per 31 Desember 2024 terdapat penerimaan kembali belanja barang Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp6.793.253 berupa pengembalian belanja transportasi perjalanan dinas Tahun 2023